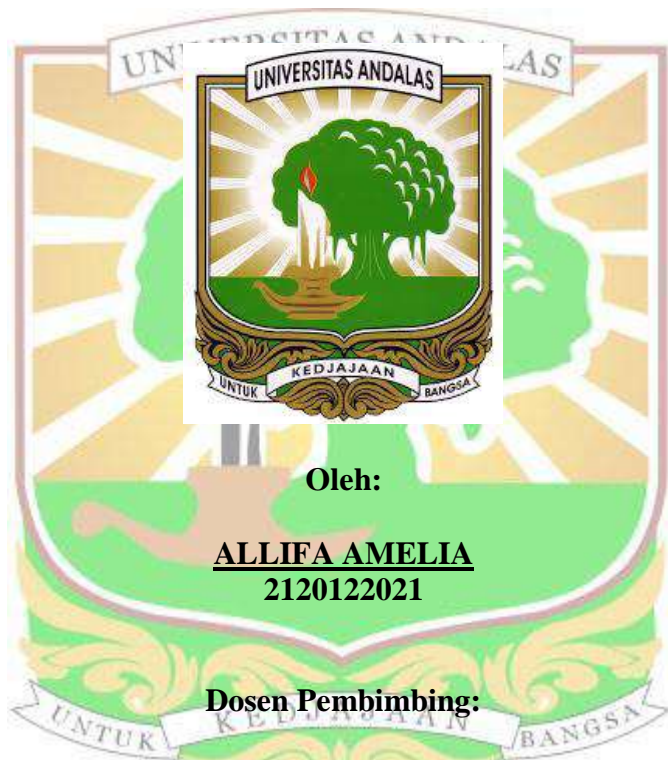


TESIS

**PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI ASET PEMERINTAH
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK SEKOLAH
(STUDI KASUS MAN 2 KOTA PADANG PANJANG)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas*



Oleh:

ALLIFA AMELIA
2120122021

Dosen Pembimbing:

Dr. FERDI, SH., MH
Dr. YUSSY ADELINA MANNAS, SH., MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

**PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI ASET PEMERINTAH
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK SEKOLAH
(STUDI KASUS MAN 2 KOTA PADANG PANJANG)**

**Allifa Amelia, 2120122021, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2023**

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hal tersebut tanah-tanah yang ada di Indonesia harus didaftarkan termasuk tanah sekolah yang merupakan bagian dari Aset Pemerintah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara pensertifikatan tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah penting dilakukan. Tanah Sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang sebagai Aset Pemerintah belum seluruhnya terdaftar sertifikat tanahnya. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah Bagaimana Perolehan tanah sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang sebagai aset pemerintah (Kementerian Agama), Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah MAN 2 Kota Padang Panjang sebagai aset pemerintah (Kementerian Agama). Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perolehan Tanah Sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki MAN 2 Kota Padang Panjang adalah melalui Perjanjian Hak Pakai yang dibuat pada tahun 1967 dan beberapa melalui proses jual beli. Akan tetapi generasi selanjutnya dari pemilik tanah atas Hak Pakai tersebut tidak mengakui surat tersebut sehingga pihak sekolah tidak dapat menjadikan surat-surat tersebut sebagai bukti serta alas hak dan pendaftaran tanah yang berasal dari jual beli tidak memiliki syarat-syarat yang lengkap sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah sekolah sebagai Aset Pemerintah (kementerian agama) di BPN Kabupaten Tanah Datar. Pendaftaran Tanah Sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang, sesuai ketentuan proses pendaftaran tanah sebagai Aset Pemerintah yaitu melalui 3 proses yaitu pendaftaran pengukuran, pendaftaran permohonan SK dan Pendaftaran SK. pendaftaran tanah sekolah dalam proses pendaftarannya terkendala dalam hal perolehan alas hak berupa pernyataan batas-batas tanah (sepadan) dan pernyataan atas peralihan hak atas tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Tanah Sekolah, Aset Pemerintah.

REGISTRATION OF LAND AS A GOVERNMENT ASSET WHICH IS USED FOR SCHOOLS (CASE STUDY MAN 2 PADANG PANJANG CITY)

ABSTRACT

**Allifa Amelia, 2120122021, Master of Notary, Faculty of Law,
Andalas University, 2023**

Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is amended by Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats and Land Registration. Based on this, land in Indonesia must be registered, including school land which is part of Government Assets, this is regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury land certification. Land owned or controlled by the central/regional government is important. The land for the MAN 2 School in Padang Panjang City as a Government Asset has not yet had all its land certificates registered. Based on this, the problem formulation in this thesis is How to acquire MAN 2 Padang Panjang City school land as a government asset (Ministry of Religion), How is the process of registering MAN 2 Padang Panjang City land as a government asset (Ministry of Religion). This type of research can be classified as empirical juridical research. The results of the research and discussion show that the acquisition of land for the MAN 2 Padang Panjang City School based on documentary evidence owned by Man 2 Padang Panjang City was through a Use Rights Agreement made in 1967 and some through a sale and purchase process. However, the next generation of land owners with the Right to Use did not recognize the letter so that the school could not use the letters as proof and the basis for rights and land registration originating from buying and selling did not have complete conditions so that the implementation of school land registration as a Government Asset (ministry of religion) at BPN Tanah Datar Regency. Registration of Land for the MAN 2 School in Padang Panjang City, in accordance with the provisions of the land registration process as a Government Asset, namely through 3 processes, namely registration of measurements, registration of SK applications and Registration of SK. School land registration in the registration process is hampered by obtaining rights in the form of a statement of land boundaries (equivalent) and a statement of the transfer of land rights.

Keywords : *Land Registration, School Land, Government Assets.*